

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
(P-RENJA)**

**2021**



**KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Hubungan antar dokumen .....	5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	6
1.5. SistematikaPenulisan .....	6
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	15
BAB IV PENUTUP .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Sukomoro Tahun 2021 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2021, Renstra Kecamatan Sukomoro tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Sukomoro Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2018 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Sukomoro tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;

11. Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2020 ; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 nomor 30 );
13. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 53;
17. Peratutan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang penerapan rencana strategis perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2018 -2023 ( Berita daerah Kabupaten Magetan tahun 2020 nomor 16 )

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen perubahan Renja tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja merupakan Renja induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau provinsi. Penjelasan keterkaitan dokumen antara perubahan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya :

1. Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Perubahan Renja disusun dengan berpedoman pada Renja induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
3. Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
4. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran.
5. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Sukomoro;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Sukomoro;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Kecamatan Sukomoro Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BABI. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2021, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan triwulan II (Kompilasi hasil sapaian target kinerja Renja SKPD dengan target Renstra SKPD)

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran / perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indiatif, lokasi, kelompok sasaran, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

## BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKOMORO**

### **SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan Kemiskinan perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan Program / kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program /kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghausan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan / penghapusan program/kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel berikut :



**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Magetan  
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan  
Periode Pelaksanaan : 2021 Triwulan II**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :  
- Scor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimum 79 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Peningkatan Jawa b	Ket.		
											I	II	12 = 8+9+10+11										13 = 12/7x100	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah KECAMATAN SUKOMORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dan pelayaan publik yg efektif & efisien	7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	80	Skor	8.487.081.418			79	skor	2.58 3.94 5.854	79	skor	335.383.712	79	skor	667.062.121	158	Skor	1.00 2.64 3.833	2080	3880	158	skor	1.00 2.64 3.833	1975	13	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %	72	Dokumen	26.920.000	Dokumen	7.000.000	4	Dokumen	17.557.750		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0	94,28		0	0	0	KEC AMATAN SUKOMORO	
		7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun 4 dokumen	36	dokumen	5.960.000	Dokumen	7.000.000	4	Dokumen	1.960.000		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0	94,28		0	0	0	KEC AMATAN SUKOMORO	

		7.01.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, jumlah survey IKM	36	dokumen	20.960.000	-	Dokumen	12	bulan	15.597.750		Dokumen	-	dokumen	0	-	Dokumen	-	-	0	94,28		0	0	0	KEC AMATAN SUKOMORO	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN, jumlah dokumen laporan keuangan	60	laporan	6.321.573.744		Laporan	12	bulan	2.096.661.248	3	Bulan	272.731.626	3	Bulan	570.864.965	6	bulan	843.596.591	500,24	4024	6	bulan	843.596.591	4,55	1,334	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan dan gaji dalam satu tahun	36	laporan	6.286.473.744		laporan	12	bulan	2.095.491.248	3	Bulan	272.731.626	3	Bulan	570.864.965	6	bulan	843.596.591	500,24	4024	6	bulan	843.596.591	7,69	1,3342	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	24	bulan	35.100.000	-	-	12	bulan	1.170.000		Bulan			Bulan	-		Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC AMATAN SUKOMORO

		7.01.01.01.2.06	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	persent ase pelaksa naan kegiata n pember dayaan Kelurah an	36	Bul an	606.7 09.35 0		bul an	2 0 3 .4 2 6 .4 5 3	12	bul an	183. 388. 450	3	bul an	27. 00 5.6 50	3	Bul an	30.6 55.0 50	6	bul an	57.6 60.7 00	5 0, 0 0	3 1 , 4 4	6	bul an	57.6 60.7 00	1 6, 6 7	9 , 5 0	KEC AMA TAN SUK OMO RO
		7.01.01.2.06.01	Penyediaa n kompone n instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	jumlah penyedi aan kompon en instalasi listrik peneran gan bangun an kantor	36	Bul an	16.72 8.750		Bul an		12	bul an	4.626 .250		bul an			Bul an			Bul an	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC AMA TAN SUK OMO RO
		7.01.01.2.06.02	Penyediaa n peralatan dan perlengka pan kantor	Jumlah Penyedi aan peralata n dan perlengk apan kantor	36	bul an	182.6 50.70 0		Bul an		12	bul an	55.21 6.300	3	bul an	17. 064 .45 0 -	3	Bul an	4.4 26. 650	6	Bul an	21.4 91.1 00	5 0, 0 0	3 , 3 9 2	6	bul an	21.4 91.1 00	1 6, 6 7	1 , 7 7	KEC AMA TAN SUK OMO RO
		7.01.01.2.06.03	Penyediaa n peralatan rumah tangga	Jumlah Penyedi aan peralata n rumah tangga	36	bul an	14.67 1.850		Bul an		12	bul an	3.350 .350		bul an	-	6	bul an	1.4 54. 950	6	bul an	1.4 54.9 50	5 0, 0 0	4 , 3 3	6	bul an	1.4 54.9 50	1 6, 6 7	9 , 9 2	KEC AMA TAN SUK OMO RO
		7.01.01.2.06.04	Penyediaa n bahan logistik kantor	Jumlah Penyedi aan bahan logistik kantor	36	bul an	206.0 44.05 0	-	Bul an		12	bul an	68.68 0.050	3	bul an	7.2 79. 200	3	bul an	17. 966 .45 0	6	Bul an	25.2 45.6 50	5 0, 0 0	3 , 6 7 6	6	Bul an	25.2 45.6 50	1 6, 6 7	1 , 2 5	KEC AMA TAN SUK OMO RO

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan	36	bulan	41.814.000		Bulan	12	bulan	12.915.500	3	bulan	1.662.000	3	bulan	2.447.000	6	Bulan	4.109.000	5000	3181	6	Bulan	4.109.000	1667	983	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	bulan	19.800.000	-	Bulan	12	Bulan	6.600.000	3	bulan	1.000.000	3	bulan	1.250.000	6	Bulan	2.250.000	5000	349	6	Bulan	2.250.000	1667	136	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	bulan	125.000.000	-	bulan	12	Bulan	32.000.000	-	-	-	6	bulan	3.110.000	6	bulan	3.110.000	5000	972	6	bulan	3.110.000	1667	266	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.01.2.08	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan</b>	<b>36</b>	<b>bulan</b>	<b>694.518.768</b>		<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>231.448.056</b>	<b>3</b>	<b>bulan</b>	<b>31.942.436</b>	<b>3</b>	<b>bulan</b>	<b>47.213.756</b>	<b>6</b>	<b>bulan</b>	<b>79.156.192</b>	<b>5000</b>	<b>3420</b>	<b>6</b>	<b>bulan</b>	<b>79.156.196</b>	<b>1667</b>	<b>140</b>	<b>KEC AMATAN SUKOMORO</b>

		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	bul an	81.80 3.768		Bul an	12	bul an	27.04 3.056	3	bul an	3.7 62. 436	3	bul an	5.4 03. 756	6	bul an	9.16 6.19 2	5 0, 0 0	3 3 , 8 9	6	Bul an	9.16 6.19 2	1 6, 6 7	1 , 2 1	KEC AMA TAN SUK OMO RO	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	36	bul an	26.74 0.000		Bul an	12	bul an	9.080 .000	3	bul an	1.1 80. 000	3	bul an	1.5 10. 000	6	bul an	2.69 0.00 0	5 0, 0 0	2 , 6 3	6	bul an	2.69 0.00 0	1 6, 6 7	1 , 0 6	KEC AMA TAN SUK OMO RO	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	bul an	585.9 75.00 0		Bul an	12	bul an	195.3 25.00 0	3	bul an	27. 000 .00 0	3	bul an	40. 300 .00 0	6	bul an	67.8 00.0 00	5 0, 0 0	3 4 , 4 6	6	bul an	67.8 00.0 00	1 6, 6 7	1 , 4 9	KEC AMA TAN SUK OMO RO	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan	36	bul an	218.7 01.60 0	1 2	bul an	1 0 0 2 .9 2 1 .8 1 8	12	bul an	54.8 90.3 50	3	bul an	3.7 04. 00 0	3	bul an	18.5 26.3 50	6	bul an	22.2 30.0 00	5 0, 0 0	4 0 , 5 0	6	bul an	22.2 30.3 50	1 6, 6 7	1 , 1 6	KEC AMA TAN SUK OMO RO







		7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	36	bulan	47.887.900		Bulan	3	kegiatan	5.323.400	3	kegiatan	1.507.400	Kegiatan	-	3	Kegiatan	1.507.400	100	2832	3	Kegiatan	1.507.400	15000	315	KEWCAMATAN SUKOMORO	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)per program 50,00</b>																						28,32	40	%	1.507.400	50	3	KEC AMATAN SUKOMORO	
<b>Predikat Kinerja</b>																													
<b>Tercapainya kegiatan di Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien</b>	7.01.03	<b>Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>persentase desa/keurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>	36	kegiatan	83.065.400		Bulan	6	kegiatan	735.780.110	3	kegiatan	3.041.000	3	Kegiatan	44.443.400	3	Bulan	63.296.100	5000	8,60	40	%	63.296.100	506	76	<b>KEC AMATAN SUKOMORO</b>
		7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwil kecamatan</b>	36	kegiatan	83.065.400		Bulan	6	kegiatan	22.225.400	3	kegiatan	3.041.000	1	kegiatan	1.612.500	4	kegiatan	4.653.500	5000	20,94	4	Kegiatan	4.653.500	2000	560	<b>KEC AMATAN SUKOMORO</b>

		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	36	kegiatan	83.065.400		Bulan	6	kegiatan	22.225.400	3	kegiatan	3.041.000	1	Kegiatan	1.612.500	4	kegiatan	4.653.500	1	2	4	Kegiatan	4.653.500	1	5	KEC AMATAN SUKOMORO
<b>Rata-rata capaian kinerja (%) per program</b>																						50,00	8,60	40	%	63.296.100	50	76	KEC AMATAN SUKOMORO
<b>Predikat Kinerja</b>																													
<b>Kegiatan sinergitas forkompimca</b>	<b>Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib, dan agamis</b>	7.01.04	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persentase/desa/kecamatan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>	36	kegiatan	194.702.600		Bulan	6	kegiatan	37.607.100	3	kegiatan	2.916.000	3	kegiatan	8.504.800	6	kegiatan	11.420.800	1	3	6	kegiatan	11.420.800	3	6	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	36	kegiatan	194.702.600		Bulan	6	kegiatan	37.607.100	3	kegiatan	2.916.000	3	kegiatan	8.504.800	6	kegiatan	11.420.800	1	3	6	kegiatan	11.420.800	3	5	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	36	kegiatan	194.702.600		Bulan	6	kegiatan	37.607.100	3	kegiatan	2.916.000	3	kegiatan	8.504.800	6	kegiatan	11.420.800	1	3	6	kegiatan	11.420.800	3	5	KEC AMATAN SUKOMORO



Predikat kinerja																															
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	75	%	3.190.662.180		kegiatan	771.669.200	12	bulan	638.554.060	3	bulan	15.811.700	3	Bulan	22.405.600	6	bulan	38.217.300	5000	5,98	6	Bulan	38.217.300	6000	1,20	KEC AMTAN SUKOMORO	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (DAU Tambahan)	36	bulan	1.893.157.500		Kegiatan	444.838.000	12	bulan	307.027.500	-	bulan	-	-	bulan	-	-	6	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat, Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan)	36	bulan	1.263.200.280		Kegiatan	721.795.000	12	bulan	320.091.760	3	bulan	13.905.900	3	bulan	21.452.700	6	bulan	35.358.600	5000	11,05	6	Bulan	35.358.500	7,41	2,80	KEC AMATAN SUKOMORO	
		7.01.03.2.02.03	Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan	36	bulan	34.304.400		Kegiatan		12	Bulan	11.434.800	3	bulan	1.905.800	3	Bulan	952.900	6	bulan	2.858.700	5000	25,00	6	Bulan	2.558.700	15,88	8,33	KEC AMTAN SUKOMORO	

		7.01.03.205	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM)	33	bulan	523.835.830		Kegiatan	100%	75.000.650	-	bulan	3	bulan	20.425.300	333	2733	3	Bulan	20.425.300	300	300	KEC AMATAN SUKOMORO	
			Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	bulan	32.232.700		Kegiatan	9	Bulan	5.000.000		bulan	3	Bulan	1.100.000	333	2200	3	Bulan	1.100.000	833	341	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.03.205.02	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	bulan	132.839.130		Kegiatan	9	Bulan	28.429.750		bulan	3	bulan	8.998.850	333	3165	3	Bulan	8.998.850	677	77	KEC AMATAN SUKOMORO
		7.01.03.205.03	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	bulan	349.777.500		Kegiatan	9	Bulan	40.559.900		Bulan	3	bulan	10.326.450	333	2546	3	Bulan	10.826.450	833	295	KEC AMATAN SUKOMORO





# **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Penyusunan perubahan renja SKPD tahun 2021 tetap mengacu pada Renstra Tahun 2021, yang merupakan tahun kelima perodesasi Renstra Kecamatan Sukomoro tahun 2018 – 2023. Arah kebijakan Renstra yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
2. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
3. Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
6. Evaluasi desa/kelurahan melalui monev

Program dan kegiatan Prioritas dalam perubahan Renja tahun 2021 tetap mengacu pada Program Prioritas Renstra 2018 – 2023 dan Renja tahun 2021 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan peralatan rumah tangga
    - Penyediaan bahan logistik kantor



- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

- Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan
- Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan
- Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan
- Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan

Kebijakan prioritas yang ditetapkan dalam perubahan renja SKPD tahun 2021 adalah penyesuaian belanja wajib dan mengikat karena adanya pergeseran anggaran meliputi :



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					
			TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)			
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	3	4	5	6	9	10	11	
	<i>Fungsi Penunjang Urusan</i>					2.465.491.248	2.310.803.804	(154.687.444)
	<i>Administrasi Pemerintahan [4011801] KECAMATAN SUKOMORO</i>					2.465.491.248	2.310.803.804	(154.687.444)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kepuasan masyarakat/persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi- persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	75 skor	75 skor		2.347.886.648.00	2.243.078.154.00	(104.808.494 )
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dokumen perangkat daerah, jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, jumlah survey IKM	12 Bulan	12 Bulan		17.557.750,00	16.197.750,00	(1.360.000,00)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	4 dokumen	4 dokumen		1.960.000.00	600.000.00	(1.360.000,00)

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	12 bulan	12 bulan	15.597.750,00	15.597.750,00	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN, jumlah dokumen laporan keuangan	<b>75 skor</b>	<b>80 skor</b>	<b>2.096.661.248</b>	<b>1.982.884.304</b>	<b>(113.776.944)</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan dan gaji dalam 1 tahun	26 laporan	26 laporan	2.095.491.248	1.982.434.304	(113.056.944)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 bulan	12 bulan	1.170.000	450.000	(720.000)
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, jumlah penyediaan peralatan rumah tangga, jumlah penyediaan bahan logistik kantor, jumlah penyediaan barang cetak penggandaan, jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 skor	80 skor	<b>121.832.250</b>	<b>134.706.500</b>	<b>(12.874.250)</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	1.575.000	0	(1.575.000)

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	17.399.100	32.917.850	15.518.750
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	2.189.600	2.189.600	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan bahan logistik	12 bulan	12 bulan	60.298.050	65.298.050	5.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	7.070.500	6.001.000	(1.069.500)
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	3.300.000	3.300.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat/persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi-persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>75 skor</b>	<b>80 skor</b>	<b>58.912.700</b>	<b>58.912.700</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya sumberdaya air, listrik, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	14.662.700	14.662.700	

2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya peralatan penunjang dalam pekerjaan	12 bulan	12 bulan	5.250.000	5.250.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	39.000.000	39.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>75 persen</b>	<b>75 persen</b>	<b>52.922.700</b>	<b>50.376.900</b>	<b>(2.545.800)</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang di pelihara	12 bulan	12 bulan	48.202.000	45.656.200	2.545.800
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	4.720.700	4.720.700	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>13.887.900</b>	<b>3.127.400</b>	<b>(10.760.500)</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12	Kegiatan	<b>13.887.900</b>	<b>3.127.400</b>	<b>(10.760.500)</b>

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	<b>13.887.900</b>	<b>3.127.400</b>	(10.760.500)
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 82	70%	80%	<b>54.417.800</b>	<b>31.209.350</b>	<b>(23.208.450)</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	6 kegiatan	6 kegiatan	<b>54.417.800</b>	<b>31.209.350</b>	<b>(23.208.450)</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah administrasi kewilayahan di Desa dan di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	<b>54.607.100</b>	31.607.100	(23.208.450)
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 83	70%	80%	<b>26.233.500</b>	<b>21.913.500</b>	<b>(4.320.000)</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	2 kegiatan	12 kegiatan	<b>26.233.500</b>	<b>21.913.500</b>	<b>(4.320.000)</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan	2 kegiatan	12 kegiatan	26.233.500	21.913.500	(4.320.000)
	<b>JUMLAH</b>				<b>2.465.491.248</b>	<b>2.310.803.804</b>	<b>154.687.444</b>
	<b>Administrasi Pemerintahan [4011802] Kelurahan Tinap</b>				1.311.728.566	<b>981.080.066</b>	<b>(330.648.500)</b>



	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>75 skor</b>	<b>80 skor</b>	<b>248,174,506</b>	<b>256,287,802</b>	<b>8.113.296</b>
	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, jumlah penyediaan peralatan rumah tangga, jumlah penyediaan bahan logistik kantor, jumlah penyediaan barang cetak penggandaan, jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i></b>	<b><i>75 skor</i></b>	<b><i>80 skor</i></b>	<b><i>67.625.700</i></b>	<b><i>72,509,350</i></b>	<b><i>4.883.650</i></b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	3.051.250	3.051.250	0
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	37.817.200	42.700.850	4.883.650
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	1.160.750	1.160.750	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	8.382.000	8.382.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dn penggandaan	12 bulan	12 bulan	6.914.500	6.914.500	

6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	12 bulan	12 bulan	3.300.000	3.300.000	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	
	<b>Penyediaan jasa urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor, Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>172.535,356</b>	<b>175.765.002</b>	<b>3.229.646</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12.380.356	15.435.002	3.054.646
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	3.830.000	3.830.000	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	156.325.000	156.500.000	175.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>75 Skor</b>	<b>75 skor</b>	<b>8.013.450</b>	<b>8.013.450</b>	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang di pelihara	12 bulan	12 bulan	4.760.000	4.760.000	

2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	3.253.450	3.253.450	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80</b>	<b>80 skor</b>	<b>80 skor</b>	<b>1,063,554,060</b>	<b>724,792,264</b>	<b>(338.761.796)</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentasi Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.063.554.060</b>	<b>629,929,864</b>	<b>(433.624.196)</b>
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	12 bulan	12 bulan	631,052,500	307.027.500	(324.025.000)
2	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	12 bulan	12 bulan	421,066,760	311,467,564	(109.599.196)
3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi di Wilayah Kelurahan	12 bulan	12 bulan	11.434.800	11.434.800	
	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	<b>9 bulan</b>	<b>9 bulan</b>		<b>94,862,400</b>	<b>94,862,400</b>
1	Pencegahan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Pencegahan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	9 bulan	9 bulan		41.070.800	510.900

2	Penanganan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Penanganan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	9 bulan	9 bulan		44,115,600	
3	Pembinaan Penanganan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penanganan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	9 bulan	9 bulan		8,665,000	
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan covid 19 di Tingkat Desa/Kelurahan	9 bulan	9 bulan		1,011,000	
<b>TOTAL</b>						<b>981,080,066</b>	<b>(330.648.500)</b>

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Sukomoro tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2021. Perubahan renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2020 – 2023.

Perubahan renja Kecamatan Sukomoro tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Sukomoro.

Magetan, Nopember 2021

Camat Sukomoro

**Drs. KUN. IHWAN HIDAYAT, M.Si**

*Pembina Tingkat I*

NIP. 19730606 199302 1 001